

## Indonesia Economic and Development Outlook 2026

# Mengurai Daya Saing Investasi Indonesia: Peran Institusi, Stabilitas Kebijakan, dan Agenda Reformasi

Ichsan Zurkarnaen<sup>1\*</sup> dan Nauviero Farizi Syarif<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

<sup>2</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Korespondensi: <sup>1\*</sup> [ichsanz@ekon.go.id](mailto:ichsanz@ekon.go.id)



<https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.538> | halaman: 31 - 52

### Abstrak

Artikel ini menganalisis daya saing investasi Indonesia dalam konteks perlambatan investasi global dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan institusional-komparatif, kajian ini memanfaatkan sejumlah indeks internasional yang diakui secara luas—antara lain *Global Innovation Index*, *World Competitiveness Index*, *World Digital Competitiveness Ranking*, dan *World Talent Ranking*—untuk memetakan posisi relatif Indonesia di antara negara-negara G20. Analisis tidak berhenti pada peringkat agregat, tetapi menelusuri komponen dan sub-indikator utama guna mengidentifikasi kelemahan struktural yang kerap tersembunyi di balik capaian makro yang terlihat stabil. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mencatat peningkatan realisasi investasi dan perbaikan terbatas dalam beberapa indikator daya saing, kualitas daya saing investasi masih dibatasi oleh persoalan institusional. Dua aspek krusial, yakni stabilitas kebijakan untuk berusaha dan stabilitas politik serta operasional, menunjukkan tren pelemahan yang berpotensi meningkatkan risiko bagi investor. Temuan ini diperkuat oleh *World Bank Business Ready (B-READY) Report 2024*, yang menyoroti tantangan utama berupa ketidakpastian implementasi regulasi, proses perizinan yang berlarut, serta lemahnya konsistensi penegakan aturan. Artikel ini juga menempatkan reformasi regulasi terkini, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan rencana revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dalam kerangka penguatan institusi. Kontribusi utama tulisan ini adalah menegaskan bahwa keberlanjutan daya saing investasi di Indonesia sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas institusi dan kepastian kebijakan, bukan semata oleh besaran realisasi investasi.

**Kata Kunci:** Indonesia Economic Outlook 2026; RPJMN 2025–2029; middle-income trap; productivity-driven growth; Indonesia Emas 2045.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

## I. Pendahuluan

Arus investasi global saat ini berada dalam fase kontraksi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Pada tahun 2024, arus *foreign direct investment* (PMA) global tercatat turun sebesar 11%, didorong oleh eskalasi kebijakan proteksionis, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan yang mendorong investor bersikap lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan lokasi investasi ((UNCTAD), 2025). Dalam konteks global yang semakin kompetitif ini, negara-negara—termasuk negara berkembang—dituntut untuk mampu menawarkan lingkungan investasi yang tidak hanya menarik secara jangka pendek, tetapi juga stabil dan kredibel dalam jangka Panjang (World Bank Group, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, telah mencatat perbaikan iklim investasi dalam dua dekade terakhir, namun daya saingnya masih relatif tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun reformasi perizinan telah meningkatkan persepsi kemudahan berusaha, tantangan berupa kompleksitas administratif, ketidakpastian implementasi kebijakan, dan biaya transaksi yang relatif tinggi masih menjadi kendala bagi investor (Amrullah & Sulaiman, 2026; Oktaviana & Wulandari, 2022; Putri et al., 2018). Temuan empiris juga menegaskan pentingnya stabilitas makroekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta koherensi kebijakan investasi dalam menarik dan mempertahankan PMA, terutama di tengah ketidakpastian global (Budiman et al., 2025).

Berangkat dari dinamika tersebut, *paper* ini bertujuan untuk menganalisis daya saing investasi Indonesia dalam perspektif global dengan memanfaatkan indeks dan indikator daya saing internasional yang banyak digunakan dalam perumusan kebijakan. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi faktor-faktor kunci yang membentuk posisi relatif Indonesia dibandingkan negara lain, sekaligus penelusuran sub-faktor kritis yang menunjukkan tantangan struktural tersembunyi di balik capaian agregat yang relatif stabil.

Sejauh ini, kajian daya saing investasi Indonesia masih didominasi oleh perbandingan peringkat atau skor agregat indeks global, tanpa pembacaan yang lebih mendalam terhadap sub-faktor institusional dan implikasinya terhadap keputusan investasi riil. Belum banyak studi yang secara sistematis mengaitkan hasil indeks daya saing global dengan realisasi investasi dan agenda reformasi regulasi terkini. Paper ini berupaya mengisi celah tersebut dengan pendekatan analitis yang lebih granular, sebagai dasar untuk menghubungkan daya saing investasi, kepastian regulasi, dan reformasi struktural yang dibahas pada bagian selanjutnya.

## II. Metode dan Sumber Data

Analisis ditempatkan dengan data sebagai fondasi utama, sementara interpretasi dan penarikan makna dilakukan secara kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk grafik dengan rentang waktu tertentu untuk menggambarkan perkembangan investasi, pola struktural, serta dinamika perubahan ekosistem investasi Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara daya saing investasi, kebijakan publik, dan realisasi investasi tanpa melakukan pengujian kausalitas statistik yang bersifat prediktif ketat.

Fokus utama analisis diarahkan pada:

- a. Identifikasi tren jangka menengah daya saing investasi Indonesia;
- b. Pembacaan pola struktural yang konsisten lintas indikator; dan
- c. Evaluasi kesenjangan (*gap*) antara capaian agregat dan kondisi di tingkat sub-indikator.

Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap kualitas lingkungan investasi, khususnya dalam konteks ketidakpastian global dan meningkatnya selektivitas investor

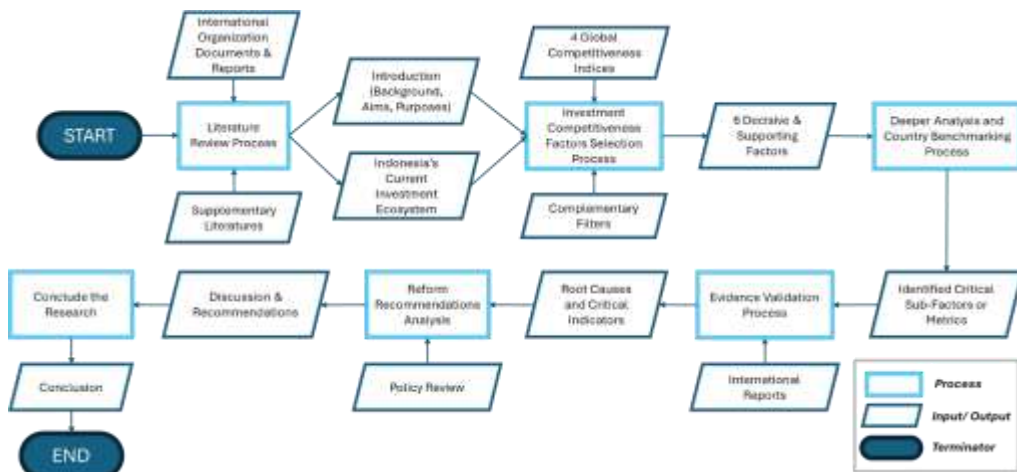
**2.1. Kerangka Analisis**

Kerangka analisis paper ini disusun secara bertahap dan saling terhubung. Tahap pertama adalah pemanfaatan empat indeks global daya saing dan investasi untuk memetakan posisi relatif Indonesia dibandingkan negara lain. Indeks-indeks tersebut digunakan sebagai alat *benchmarking* untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang secara konsisten memengaruhi persepsi dan keputusan investor lintas negara.

Tahap kedua adalah dekomposisi indeks ke dalam faktor dan sub-faktor. Dari faktor-faktor utama tersebut, analisis difokuskan pada identifikasi sub-faktor yang menunjukkan ketidaksinkronan antara capaian agregat dan kinerja indikator spesifik. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kelemahan struktural sering kali tersembunyi di balik performa rata-rata yang relatif stabil, sehingga memerlukan pembacaan yang lebih granular.

Tahap ketiga adalah validasi evidensi, yaitu mengaitkan temuan berbasis indeks dengan data mikro dan literatur empiris. Validasi ini dilakukan melalui perbandingan dengan indikator operasional yang lebih konkret, seperti persepsi pelaku usaha, hasil survei perusahaan, serta temuan studi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis indeks mencerminkan kondisi riil yang dihadapi investor di lapangan, bukan sekadar perubahan metodologi atau persepsi global semata.

Tahap terakhir adalah pengaitan hasil analisis dengan kebijakan publik dan realisasi investasi, khususnya dalam konteks reformasi struktural dan kepastian regulasi. Pada tahap ini, temuan analitis digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi kebijakan yang telah dilakukan mampu menjawab tantangan utama daya saing investasi Indonesia, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan implementasi.



**Gambar 2. 1** Diagram Alur Metodologi Riset

Sumber: Analisis Penulis

## 2.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam paper ini bersumber dari statistik nasional dan internasional yang kredibel. Sumber utama meliputi:

- Indeks daya saing dan investasi global (empat indeks utama) sebagai dasar benchmarking internasional;
- World Bank Business Ready (B-READY) Report* untuk mengukur kualitas regulasi dan implementasi kebijakan usaha;
- Data realisasi investasi PMA dan PMDN Indonesia dengan cakupan waktu lima tahun terakhir;
- Dokumen kebijakan nasional, termasuk regulasi dan kerangka kebijakan investasi yang relevan, sebagai dasar analisis reformasi struktural.

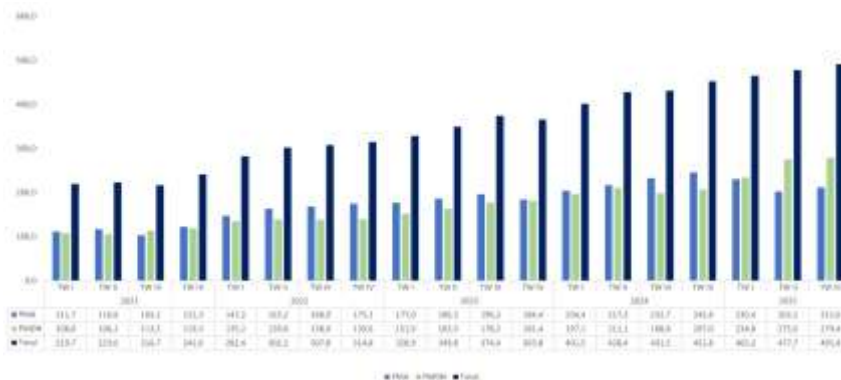
Seluruh data disajikan dalam bentuk runtut waktu untuk memudahkan pembacaan tren dan perubahan struktural, serta divisualisasikan secara ringkas agar mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.

## III. Perkembangan dan Dinamika Investasi di Indonesia

### 3.1 Perkembangan Investasi di Indonesia

Investasi tetap menjadi pilar utama dalam agenda pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.032 triliun pada periode 2025–2029 sebagai bagian dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 ([BPMI Setpres, 2025](#)). Dalam jangka menengah, target investasi nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, tercermin dari penetapan target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.175,26 triliun, meningkat 14,2% dibandingkan target tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun ([Muliawati, 2025](#)).

Secara empiris, realisasi investasi Indonesia pada periode Triwulan I 2021 hingga Triwulan III 2025 menunjukkan tren peningkatan secara agregat, baik untuk PMA maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ([Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, 2025](#)). Data Triwulan IV 2025 memperkuat tren tersebut, dengan realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931 triliun atau melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 1.905,6 triliun, meningkat 12,7% dibandingkan realisasi tahun 2024 ([Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, 2026](#)).



**Gambar 3. 1** Perkembangan Realisasi Investasi Indonesia TW1 2021 – TWIII 2025

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, 2025

Dari sisi dampak ekonomi, peningkatan investasi juga tercermin pada penyerapan tenaga kerja yang tumbuh sebesar 10,4% dibandingkan tahun 2024, dengan total tenaga kerja terserap mencapai 2.710.532 orang. Kinerja PMDN menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai Rp1.030,3 triliun atau tumbuh 26,6% secara tahunan. Sebaliknya, realisasi PMA secara agregat hanya meningkat 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya, melanjutkan pola stagnasi yang telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi domestik semakin menguat, kinerja investasi asing masih menghadapi tantangan struktural yang perlu dicermati ke depan (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, 2025, 2026).

Dari sisi sektoral, analisis menunjukkan bahwa selama periode 2015–2025, investasi asing di Indonesia didominasi oleh sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Sektor ini menempati posisi teratas pada enam dari sepuluh tahun terakhir. Sektor pertambangan secara konsisten berada pada peringkat kedua dalam rata-rata realisasi PMA selama satu dekade terakhir. Pola ini menunjukkan kuatnya orientasi investasi asing pada sektor berbasis sumber daya dan industri hulu (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, 2026).

**Tabel 3. 1 Analisa Konsentrasi Realisasi Investasi per Sektor di Indonesia 2015 - 2025**

Tahun	1	2	3
2015	Pertambangan	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Listrik, Gas dan Air
2016	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Kimia Dan Farmasi	Industri Kertas dan Percetakan
2017	Pertambangan	Listrik, Gas dan Air	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran
2018	Listrik, Gas dan Air	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Pertambangan
2019	Listrik, Gas dan Air	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
2020	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Listrik, Gas dan Air	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi
2021	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Pertambangan	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi
2022	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Pertambangan	Industri Kimia Dan Farmasi
2023	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Industri Kimia Dan Farmasi
2024	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Pertambangan	Industri Kertas dan Percetakan

Sumber: Analisis Penulis

Berbeda dengan PMA, PMDN menunjukkan karakteristik sektoral yang lebih berorientasi pada aktivitas domestik, dengan sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sebagai sektor utama penerima investasi domestik. Perbedaan struktur ini mengindikasikan adanya segmentasi peran antara PMA dan PMDN dalam perekonomian nasional.

Secara spasial, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dengan kontribusi Jawa sebesar 48,7% dan luar Jawa lebih dari 50% secara keseluruhan (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, 2026). Namun, jika dilihat secara spesifik pada PMA, konsentrasi di Pulau Jawa masih sangat tinggi, mencapai 72,28% dari total PMA nasional. Pola ini menunjukkan bahwa pemerataan investasi khususnya PMA secara geografis masih menjadi tantangan utama (Silalahi & Primacintya, 2025).

### 3.2 Prospek Investasi Jangka Menengah

Prospek investasi Indonesia periode 2024–2026 dinilai tetap stabil dan relatif resilien, seiring dengan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kisaran 5,0–5,5%. Kinerja ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik, struktur demografi yang didominasi oleh penduduk usia produktif, serta pertumbuhan kelas menengah yang memberikan bantalan terhadap volatilitas ekonomi global (Harahap et al., 2025).

Ke depan, arah pengembangan ekosistem investasi Indonesia semakin dipengaruhi oleh pergeseran strategis menuju industri bernilai tambah. Pemerintah mendorong transformasi dari ekonomi berbasis komoditas menuju basis industri dan teknologi, dengan hilirisasi sumber daya alam sebagai pilar utama. Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah telah berhasil menarik investasi besar, khususnya pada pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel, yang terintegrasi dalam rantai pasok global (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, 2024).

Selain itu, peluang investasi juga terbuka pada sektor ekonomi hijau dan ekonomi digital. Agenda transisi energi mendorong investasi pada energi panas bumi, surya, dan hidrogen hijau dalam rangka mencapai target *Net Zero Emission*, didukung oleh pembiayaan iklim global dan pendekatan *just energy transition* (Asian Development Bank, 2023; International Energy Agency, 2023). Di sisi lain, pertumbuhan pengguna internet dan ekonomi digital meningkatkan kebutuhan investasi pada pusat data, jaringan 5G, dan layanan komputasi awan, yang menarik minat investor global (Google et al., 2023; Harahap et al., 2025).

Dalam konteks global, Indonesia juga berada pada posisi yang relatif menguntungkan untuk memanfaatkan strategi diversifikasi rantai pasok global (*China+1 strategy*). Perusahaan multinasional dari negara Barat dan Jepang semakin mencari alternatif lokasi produksi di luar Tiongkok, dan Indonesia dipandang sebagai salah satu tujuan utama karena stabilitas politik dan besarnya pasar domestik (Enderwick, 2011; Harahap et al., 2025; Lund et al., 2019).

### 3.3 Catatan Kontekstual Reformasi Regulasi Informasi

Perkembangan investasi di Indonesia berlangsung bersamaan dengan dinamika reformasi regulasi yang panjang dan berkelanjutan. Sejarah regulasi investasi Indonesia ditandai oleh perubahan rezim kebijakan yang mengikuti dinamika politik dan ekonomi nasional, yang dalam beberapa dekade terakhir memunculkan fenomena obesitas regulasi dan tumpang tindih aturan. Kondisi *hyper-regulation* ini kerap dipandang sebagai hambatan terhadap efisiensi dan kepastian berusaha dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya (Pardede, 2023).

Upaya penyederhanaan regulasi investasi secara bertahap telah dilakukan, termasuk pergeseran dari pendekatan *Licensed-based approach* menuju kerangka investasi berbasis risiko (*Risk-based approach*), serta transformasi sistem perizinan melalui OSS dan OSS-RBA. Reformasi kelembagaan juga ditandai dengan penguatan peran BKPM menjadi kementerian investasi pada tahun 2021 (Kher et al., 2022). Namun demikian, dinamika regulasi ini lebih tepat dipahami sebagai konteks struktural yang membentuk lingkungan investasi, bukan sebagai faktor tunggal yang secara langsung menjelaskan kinerja realisasi investasi.

Temuan di atas menunjukkan bahwa peningkatan realisasi investasi Indonesia berlangsung di tengah tantangan struktural yang kompleks, baik dari sisi komposisi sektor, distribusi wilayah, maupun respons investasi asing. Dinamika tersebut mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan investasi, menjadi elemen penting yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan daya saing investasi Indonesia pada bagian berikutnya.

#### IV. Daya Saing Investasi Indonesia dalam Perspektif Global

Daya saing investasi memainkan peran penting dalam menentukan arah dan kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara konseptual, daya saing investasi tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kemampuan menarik modal semata. Daya saing ini merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor struktural, institusional, dan ekonomi yang secara bersama-sama membentuk persepsi dan keputusan investor. Schwab and Zahidi (2020) mendefinisikan daya saing investasi sebagai kombinasi faktor seperti kualitas tata kelola, infrastruktur, sumber daya manusia, sistem keuangan, serta kapasitas inovasi yang menentukan tingkat daya tarik suatu negara bagi investor domestik maupun asing. Sejalan dengan pandangan tersebut, World Bank Group (2020) menekankan bahwa daya saing investasi berkaitan erat dengan kemampuan suatu ekonomi untuk menarik dan mempertahankan PMA guna mendukung pembangunan jangka panjang dan ketahanan ekonomi, bukan sekadar menawarkan biaya produksi yang rendah.

Untuk menangkap karakter daya saing investasi yang multidimensional, penelitian ini menggunakan empat indeks global yang relevan dan diakui secara internasional. Keempat indeks ini dipilih karena masing-masing merepresentasikan pilar utama yang menopang iklim investasi yang berkelanjutan dan produktif, yaitu inovasi, daya saing ekonomi, digitalisasi, dan kualitas sumber daya manusia.

Indeks pertama, *Global Innovation Index* (GII), digunakan untuk menilai kekuatan ekosistem inovasi suatu negara. GII mencakup indikator-indikator yang relevan bagi investor, seperti belanja riset dan pengembangan, aktivitas *venture capital*, arus masuk PMA, serta kinerja manufaktur berteknologi tinggi. Dengan menilai efisiensi transformasi input inovasi menjadi output ekonomi, GII memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perekonomian dalam memaksimalkan imbal hasil investasi (World Intellectual Property Organization, 2025).

Indeks kedua, *World Competitiveness Index* (WCI), mengevaluasi kapasitas suatu negara dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung daya saing dunia usaha. WCI mencakup dimensi kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, dan efisiensi bisnis, serta secara eksplisit mengukur dinamika investasi internasional melalui indikator stok dan arus investasi masuk maupun keluar (IMD World Competitiveness Center, 2025a).

Indeks ketiga, *World Digital Competitiveness Ranking* (WDCR), digunakan untuk menilai kesiapan suatu negara dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital. Dalam konteks ekonomi global yang semakin terfragmentasi dan terdigitalisasi, kesiapan digital menjadi faktor penting bagi investor dalam menilai kelayakan strategis dan ketahanan jangka panjang suatu lokasi investasi (IMD World Competitiveness Center, 2025b).

Indeks keempat, *World Talent Ranking* (WTR), menyoroti dimensi sumber daya manusia sebagai faktor kunci daya saing investasi. WTR menilai kemampuan suatu negara dalam mengembangkan, menarik, dan mempertahankan talenta yang dibutuhkan oleh dunia usaha, khususnya melalui dimensi daya tarik (*appeal*) dan kesiapan (*readiness*) tenaga kerja terhadap kebutuhan bisnis (IMD World Competitiveness Center, 2025c).

Secara keseluruhan, keempat indeks tersebut mencakup 17 faktor yang berpotensi digunakan untuk menilai daya saing investasi. Namun, penggunaan seluruh faktor secara bersamaan berisiko menghasilkan analisis yang terlalu luas dan tumpang tindih. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan proses seleksi faktor untuk memastikan fokus analisis tetap tajam dan relevan dengan perspektif investor.



**Gambar 4. 1** Rincian Faktor yang Mempengaruhi Empat Indeks Global yang Digunakan

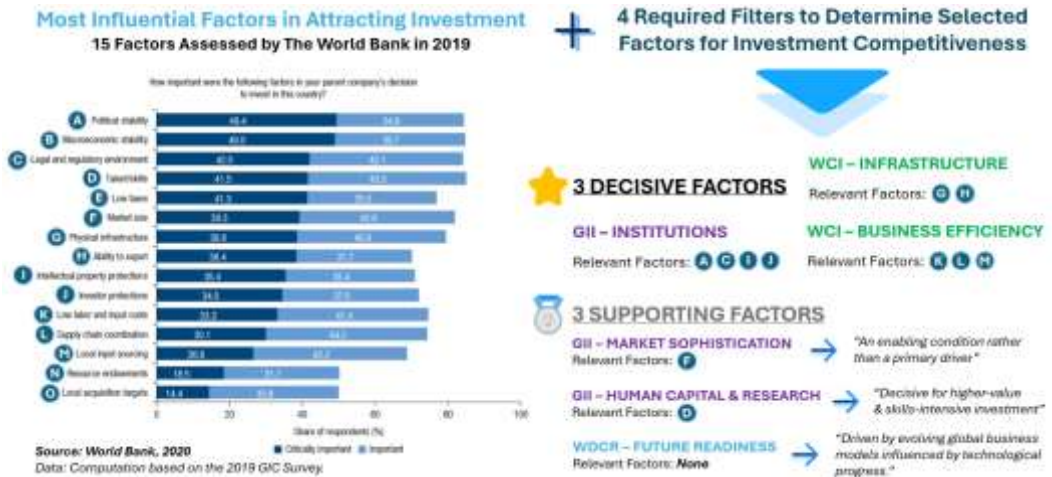
**Sumber:** IMD World Competitiveness Center, 2025c, 2025b, 2025a; World Intellectual Property Organization, 2025

Proses seleksi faktor dilakukan dengan mengacu pada *Global Investment Competitiveness (GIC) Survey World Bank* tahun 2019, yang merefleksikan preferensi dan pertimbangan utama investor global. Faktor-faktor dalam keempat indeks global diuji relevansinya terhadap hasil survei tersebut dan selanjutnya disaring menggunakan empat kriteria utama, yaitu:

- Memiliki data numerik yang dapat dibandingkan secara lintas negara;
- Memiliki relevansi yang kuat terhadap pengambilan keputusan investor;
- Bersifat struktural dan berjangka panjang, bukan siklikal; dan
- Mewakili dimensi daya saing yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih.

Hasil proses seleksi tersebut menghasilkan enam faktor utama yang dikelompokkan ke dalam faktor penentu (*decisive factors*) dan faktor pendukung (*supporting factors*). Faktor penentu terdiri atas institusi (GII), infrastruktur (WCI), dan efisiensi bisnis (WCI). Faktor institusi mencakup stabilitas politik, kualitas lingkungan hukum dan regulasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta perlindungan investor, yang secara fundamental membentuk persepsi kepastian dan keamanan investasi. Infrastruktur merefleksikan kesiapan logistik, energi, dan teknologi yang memungkinkan operasi bisnis berjalan efisien. Sementara itu, efisiensi bisnis menangkap dimensi produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan ketersediaan pembiayaan yang menentukan keberlanjutan operasional perusahaan.

Adapun faktor pendukung meliputi *market sophistication* (GII), *human capital and research* (GII), serta *future readiness* (WDCR). Ketiga faktor ini berfungsi sebagai penguat daya tarik investasi dengan mencerminkan kedalaman pasar, kesiapan talenta dan riset, serta kemampuan adaptasi teknologi dalam menghadapi perubahan struktural ekonomi global (World Bank Group, 2020).

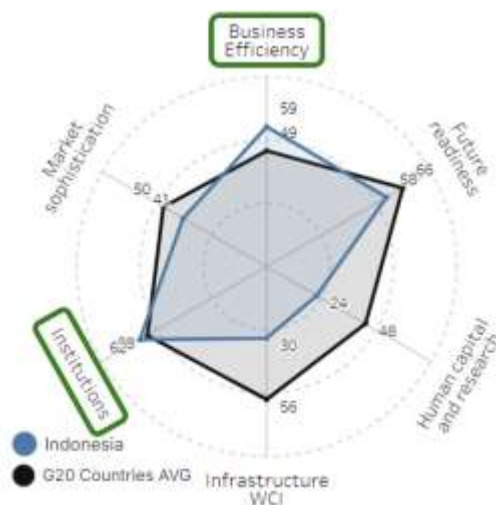


Gambar 4. 2 Proses Seleksi Faktor yang Mempengaruhi Analisis Daya Saing Investasi

Sumber: Analisis Penulis dan World Bank Group, 2020

Untuk mengetahui posisi Indonesia dalam konteks global, keenam faktor terpilih tersebut dibandingkan dengan negara-negara G20 yang memiliki data lengkap pada periode 2020–2025, yaitu Turki, Argentina, Afrika Selatan, Meksiko, Jepang, Brasil, Italia, Korea Selatan, Prancis, Australia, Inggris, Jerman, India, Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, dan Arab Saudi. Perbandingan dilakukan antara skor Indonesia dan rata-rata negara G20 (di luar Indonesia) guna mengidentifikasi pola kekuatan dan kelemahan relatif.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dua faktor yang berada di atas rata-rata G20, yaitu institusi dengan skor 62 dan efisiensi bisnis dengan skor 59. Sebaliknya, empat faktor lainnya berada di bawah rata-rata G20 dan dapat dikategorikan sebagai area kelemahan struktural. Temuan ini mengindikasikan bahwa daya saing investasi Indonesia bersifat tidak merata, dengan kombinasi antara kekuatan relatif dan keterbatasan struktural yang masih signifikan.



Gambar 4. 3 Visualisasi Perbandingan Daya Saing Investasi Indonesia dan Negara G20 Tahun 2025

**Sumber:** Analisis Penulis dan [World Intellectual Property Organization, 2025](#)

Namun demikian, analisis pada tingkat agregat faktor belum cukup untuk menjelaskan dinamika daya saing investasi secara mendalam. Kinerja yang relatif stabil pada faktor tertentu dapat menyembunyikan kerentanan struktural yang hanya dapat diidentifikasi melalui analisis yang lebih granular ([Valle-Lisboa & Mizraji, 2006](#)). Oleh karena itu, alih-alih berfokus pada faktor-faktor yang secara eksplisit lemah, analisis lanjutan dalam paper ini diarahkan pada faktor kekuatan. Dari dua kekuatan yang teridentifikasi, pembahasan akan fokus pada salah satu faktor yang paling menentukan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## V. Validasi Evidensi dan Penajaman Sub-faktor

### 5.1. Rasionalisasi Pemilihan Faktor Utama untuk Analisis Lebih Lanjut

Meskipun analisis komparatif sebelumnya mengidentifikasi dua kekuatan relatif Indonesia dalam daya saing investasi, yaitu institusi dan efisiensi bisnis, penelitian ini secara sengaja memilih faktor institusi untuk dilakukan analisis mendalam (*deep dive*). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan teoretis dan empiris bahwa kualitas institusi memiliki peran yang lebih fundamental dan bersifat *enabling* terhadap seluruh dimensi daya saing investasi lainnya.\

Literatur menunjukkan bahwa kejelasan regulasi, transparansi prosedur, serta konsistensi implementasi kebijakan merupakan determinan utama dalam menarik investasi jangka panjang ([Triana et al., 2024](#)). Investor tidak hanya menilai tingkat efisiensi operasional saat ini, tetapi juga memprioritaskan kepastian hukum dan prediktabilitas kebijakan sebagai dasar keamanan modal dalam jangka panjang. Perubahan regulasi yang terlalu sering, terutama tanpa sosialisasi yang memadai, justru menimbulkan persepsi ketidakstabilan kebijakan dan meningkatkan risiko investasi.

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menegaskan bahwa tantangan utama investasi bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada inkonsistensi dan disharmoni antarperaturan. Perbedaan interpretasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sering kali menciptakan prosedur yang tidak jelas dan memperlambat realisasi investasi. Tumpang tindih antara undang-undang sektoral—seperti Undang-Undang Minerba, Lingkungan Hidup, dan Ketenagakerjaan—dengan ketentuan penanaman modal memperbesar ketidakpastian hukum dan risiko kepatuhan bagi investor ([Amrullah & Sulaiman, 2026](#)).

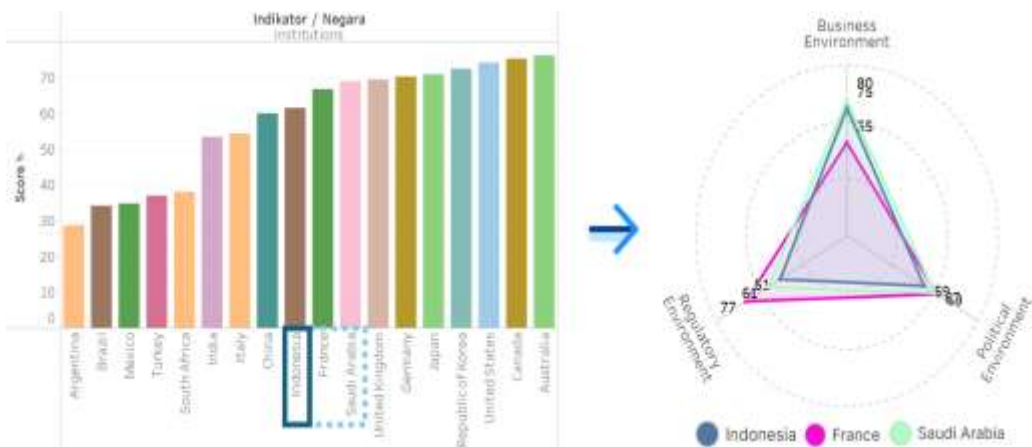
Dampak kelemahan institusional juga terbukti secara empiris. Studi menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia dengan sistem tata kelola yang lemah, ditandai oleh banyaknya regulasi daerah bermasalah, mengalami penurunan pertumbuhan PMA jangka panjang sebesar 26–30% ([Yuwono et al., 2025](#)). Temuan ini menegaskan bahwa kualitas institusi bukan sekadar isu administratif, melainkan faktor struktural yang secara langsung memengaruhi daya tarik investasi.

Secara konseptual, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami peran institusi dalam iklim investasi. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat), substansi hukum (aturan dan regulasi), serta budaya hukum (kesadaran dan perilaku terhadap hukum). Ketiga elemen ini harus berjalan secara harmonis agar sistem hukum dapat mendukung kemudahan berusaha dan kepastian investasi ([Al Kautsar & Muhammad, 2022](#); [Amrullah & Sulaiman, 2026](#)).

Lebih jauh, institusi yang efektif tidak hanya berdampak pada investor asing berskala besar, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi domestik. Penyederhanaan perizinan melalui mekanisme *self-declaration* bagi UMKM, misalnya, mendorong formalisasi usaha kecil, memperkuat rantai pasok lokal, serta menciptakan ekosistem investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Parikesit & Dewi, 2025). Dengan demikian, faktor institusi memiliki pengaruh lintas sektor dan lintas skala, menjadikannya titik masuk yang strategis untuk analisis mendalam.

### 5.2. Kinerja Umum Faktor Institusi Indonesia dalam Perspektif g20

Berdasarkan *Global Innovation Index (GII) 2025*, Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 18 negara G20 pada faktor *institutions*, atau berada pada sekitar 55% teratas negara-negara ekonomi utama dunia. Posisi ini mencerminkan kinerja institusional yang moderat dengan kecenderungan membaik. Untuk kepentingan benchmarking, analisis selanjutnya membandingkan Indonesia dengan dua negara yang berada tepat di atasnya, yaitu Arab Saudi dan Prancis.



**Gambar 5.1** Visualisasi Perbandingan Faktor Institusi Indonesia dengan Negara G20 Tahun 2025

Sumber: Analisis Penulis dan [World Intellectual Property Organization, 2025](#)

Faktor *institutions* dalam GII terdiri atas tiga sub-faktor utama, yakni:

- a. *Business Environment*;
- b. *Political Environment*; dan
- c. *Regulatory Environment*.

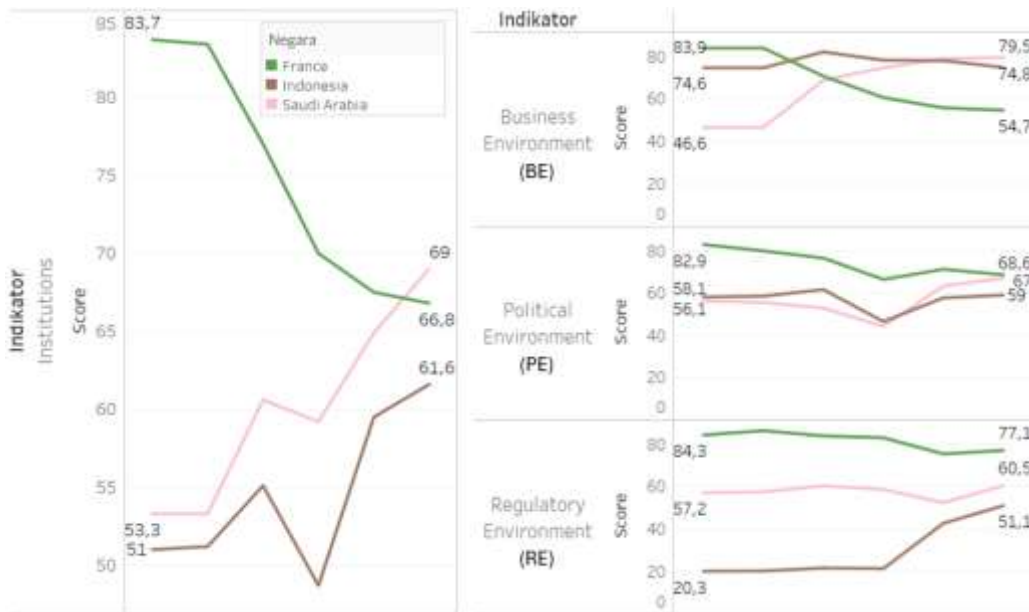
Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia belum unggul pada satu pun dari ketiga sub-faktor tersebut dibandingkan Arab Saudi dan Prancis. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun skor agregat Indonesia relatif kompetitif, masih terdapat kesenjangan struktural yang merata di seluruh dimensi institusional. Dengan kata lain, kekuatan institusi Indonesia bersifat relatif, bukan dominan, dan masih menyisakan ruang perbaikan yang signifikan.

### 5.3. Dinamika *Time-Series* Faktor Institusi dan Sub-Faktornya (2020–2025)

Analisis deret waktu periode 2020–2025 menunjukkan bahwa faktor *institutions* merupakan salah satu pilar kekuatan daya saing Indonesia. Skor institusi meningkat secara konsisten dari 51,0 pada tahun 2020 menjadi 61,6 pada tahun 2025. Tren ini memperkuat persepsi bahwa kerangka institusional Indonesia mengalami perbaikan berkelanjutan, berbeda dengan

Prancis yang justru menunjukkan tren penurunan pada periode yang sama (World Intellectual Property Organization, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025).

Pada tingkat sub-faktor, ketiga dimensi institusi—*business environment*, *political environment*, dan *regulatory environment*—sama-sama menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan institusional di Indonesia bersifat relatif menyeluruh, tidak terbatas pada satu dimensi tertentu.



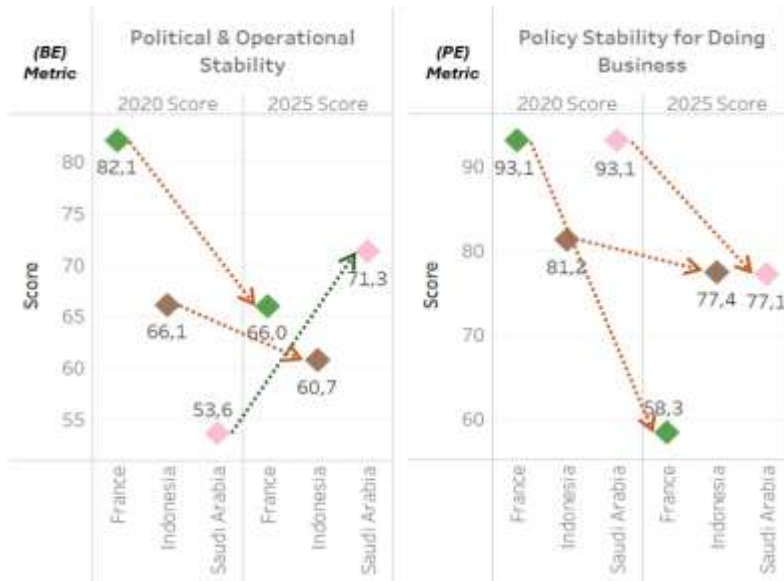
**Gambar 5. 2** Perkembangan Nilai Faktor Institusi dan Sub-faktornya Tahun 2020 – 2025 (Indonesia, Arab Saudi, dan Prancis)

**Sumber:** Analisis Penulis dan World Intellectual Property Organization, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Namun demikian, analisis pada tingkat indikator yang lebih granular mengungkap adanya kerentanan yang tersembunyi. Dua metrik kritis menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2025, yaitu:

- Policy Stability for Doing Business, yang menurun dari 81,2 menjadi 77,4;
- Political and Operational Stability, yang turun dari 66,1 menjadi 60,7.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka institusional secara agregat membaik, persepsi investor terhadap stabilitas kebijakan dan risiko politik-operasional justru melemah.



**Gambar 5. 3** Trend Perubahan Nilai Metrik “Political & Operational Stability” dan “Policy Stability for Doing Business” Tahun 2020 ke 2025

Sumber: Analisis Penulis dan [World Intellectual Property Organization, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025](#)

Perbandingan lintas negara menunjukkan bahwa tren penurunan *Political and Operational Stability* terjadi di Indonesia dan Prancis, sementara Arab Saudi justru mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa perbaikan stabilitas tidak mengikuti pola global yang seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan domestik masing-masing negara. Sementara itu, *Policy Stability for Doing Business* mengalami penurunan di ketiga negara, mengindikasikan adanya ketidakpastian kebijakan yang lebih luas dalam konteks global.

**5.4. Validasi Evidensi melalui Data *World Bank B-READY 2024***

Untuk memperkuat temuan kuantitatif di atas, dua metrik kritis tersebut divalidasi menggunakan data *World Bank Business Ready (B-READY) Report 2024*. Laporan ini dipilih karena reliabilitasnya yang tinggi, dengan metode pengumpulan data yang mengombinasikan kuesioner ahli lokal (pengacara dan pakar sektoral), *World Bank Enterprise Surveys (WBES)*, serta indikator makro dari *World Development Indicators (WDI)*.

Dalam konteks *Political and Operational Stability*, temuan B-READY 2024 menunjukkan bahwa kepastian operasional harian pelaku usaha di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi hukum, efisiensi perdagangan, administrasi perpajakan, dan tata kelola utilitas. Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara ketersediaan sistem—baik hukum, digital, maupun infrastruktur—dengan prediktabilitas implementasinya. Kesenjangan ini meningkatkan risiko hukum, logistik, keuangan, dan regulasi yang harus ditanggung investor dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Sementara itu, untuk *Policy Stability for Doing Business*, B-READY 2024 menegaskan bahwa persoalan utama iklim usaha Indonesia bukan lagi ketiadaan aturan, melainkan rendahnya keterbukaan, konsistensi, dan kepastian dalam proses kebijakan. Ketidakpastian paling menonjol terjadi pada tahapan masuk usaha, perizinan lahan dan lingkungan, serta perubahan kebijakan perpajakan. Biaya yang tinggi, waktu proses yang panjang, serta minimnya konsultasi publik

memperbesar risiko kebijakan dan secara langsung memengaruhi keputusan investasi jangka panjang.

**Tabel 5. 1** Analisa Validasi Evidensi Metrik Political & Operational Stability di Indonesia Menggunakan Data B-Ready Report 2024

Dimensi (B-READY 2024)	Indikator Kritis	Makna Indikator	Dampak terhadap Dunia Usaha & Investasi
Kepastian Hukum & Prosedural (Penyelesaian Sengketa)	a. Skor perlindungan prosedural: 0 / 4,71 b. Rata-rata penyelesaian perkara: 425 hari c. Eksekusi putusan: 150 hari d. Perlindungan mediasi lemah	Tidak ada batas waktu sidang, penundaan tidak dibatasi, perlindungan kerahasiaan dan kesukarelaan mediasi lemah, proses sangat lama.	a. Ketidakpastian penegakan kontrak b. Risiko hukum tinggi c. Biaya modal meningkat d. Turunnya kepercayaan investor
Regulasi Perdagangan & Operasional	a. Skor sistem digital: 78,1 / 100 b. Efisiensi operasional: 46,2 c. Persepsi hambatan regulasi: 83 / 100	Digitalisasi sudah maju, tetapi proses kepatuhan, inspeksi, dan kepatuhan masih lambat dan tidak sinkron.	a. Gangguan rantai pasok b. Biaya logistik tinggi c. Ketidakpastian ekspor-impor d. Daya tarik PMA manufaktur menurun
Administrasi Perpajakan & Sengketa	a. Penyelesaian sengketa pajak: 1 tahun b. 70% perusahaan menghindari restitusi PPN c. Proses pencairan tetap 2–3 minggu	Proses lama dan birokratis membuat kelebihan bayar pajak dianggap berisiko dan mahal untuk diklaim.	a. Ketidakpastian arus kas b. Kebutuhan modal kerja lebih besar c. Beban implisit bagi sektor formal d. Menurunnya kredibilitas fiskal
Utilitas & Tata Kelola Regulasi	a. Tidak ada data publik tarif dan kualitas layanan b. Lemahnya pemantauan air & internet c. Tidak ada data akses terpilah gender	Infrastruktur tersedia, tetapi transparansi regulasi dan proyeksi ke depan lemah.	a. Ketidakpastian biaya operasional b. Risiko investasi jangka panjang meningkat c. Bankabilitas proyek infrastruktur menurun

**Sumber:** Analisa Penulis dan [World Bank Group, 2024](#)

**Tabel 5. 2** Analisa Validasi Evidensi Metrik Policy Stability for Doing Business di Indonesia Menggunakan Data B-Ready Report 2024

Dimensi (B-READY 2024)	Indikator Kritis	Makna Indikator	Dampak terhadap Dunia Usaha & Investasi
Masuk Usaha & Perizinan	a. Kualitas regulasi: 80,42 vs efisiensi operasional: 26,50 b. Biaya masuk asing: 147% PNB per kapita c. Waktu proses: 65 hari (asing), 43 hari (domestik) d. Skor screening asing: 0 / 2,5	Aturan tertulis baik, tetapi implementasi lambat, mahal, dan diskresioner, khususnya bagi investor asing.	a. Hambatan masuk tinggi b. Ketidakpastian waktu perizinan c. Daya tarik PMA melemah d. Risiko kebijakan meningkat
Pertanahan & Izin Lingkungan	a. Biaya izin lingkungan: 1463% PNB per kapita b. Waktu proses: 300 hari c. Cakupan pendaftaran tanah: 0 / 8 d. Transparansi transaksi properti: 2,22 / 20 e. Aturan kepemilikan asing tidak jelas	Proses sangat mahal dan lama, kepastian hak tanah rendah, dan aturan kepemilikan tidak konsisten.	a. Risiko lokasi dan legal tinggi b. Keterlambatan proyek c. Kepastian tenurial lemah d. Minat investasi jangka panjang menurun
Proses Kebijakan Perpajakan	a. Konsultasi publik pajak: 2 / 10 b. Konsultasi pajak lingkungan: 0 / 8 c. Skor ETR pajak laba: 0 / 25 (tarif efektif $\pm 25\%$ )	Partisipasi publik rendah, transparansi perubahan aturan lemah, dan beban pajak laba relatif tinggi.	a. Prediktabilitas kebijakan fiskal rendah b. Risiko perubahan pajak meningkat c. Kepastian perencanaan usaha menurun d. Daya saing imbal hasil setelah pajak melemah

**Sumber:** Analisa Penulis dan [World Bank Group, 2024](#)

Secara keseluruhan, validasi evidensi ini mengonfirmasi bahwa penurunan pada dua metrik kritis institusi bukanlah anomali statistik, melainkan refleksi dari tantangan struktural yang nyata. Oleh karena itu, analisis institusi perlu bergerak melampaui skor agregat dan diarahkan pada pembenahan aspek stabilitas dan prediktabilitas kebijakan sebagai prasyarat utama peningkatan daya saing investasi Indonesia ke depan.

## VI. Diskusi dan Rekomendasi Reformasi Institusional Investasi

Sebagai penghubung menuju diskusi kebijakan, bagian 5 mengonfirmasi bahwa pelemahan kinerja institusional Indonesia pada dua metrik kunci—*Political and Operational Stability* serta *Policy Stability for Doing Business*—bersifat struktural dan konsisten lintas sumber data. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama daya saing investasi tidak terletak pada absennya regulasi, melainkan pada keterbatasan stabilitas, prediktabilitas, dan konsistensi implementasi kebijakan dalam praktik.

### 6.1. Posisi PP 28/2025 dan Revisi Perpres BUPM dalam Arsitektur Kebijakan Investasi

Dalam arsitektur kebijakan investasi nasional, Peraturan Pemerintah No. 28/2025 dan usulan revisi Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) berfungsi sebagai dua instrumen komplementer yang bekerja pada level kebijakan yang berbeda namun saling terkait.

PP 28/2025 merupakan revisi menyeluruh atas PP 5 Tahun 2021, yang sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) pasca-Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kelemahan implementasi PP 5/2021, khususnya terkait ketidakpastian waktu layanan, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya akuntabilitas proses perizinan. Melalui PP 28/2025, pemerintah memperkuat dimensi operasional kebijakan investasi dengan menegaskan kepastian SLA, prinsip fiktif-positif, sentralisasi perizinan melalui OSS, serta integrasi perizinan dan fasilitas investasi dalam satu sistem digital (Parikesit & Dewi, 2025).

Sementara itu, revisi Perpres BUPM merupakan penyempurnaan atas Perpres 10 dan 49 Tahun 2021, yang mengatur struktur keterbukaan dan pembatasan kepemilikan asing sektor investasi. Revisi ini diarahkan untuk menurunkan tingkat restriksi, memperluas cakupan insentif, dan menggeser pendekatan perlindungan UMKM yakni dari pembatasan menuju pemberdayaan berbasis kemitraan. Dengan demikian, Perpres BUPM berperan pada level *structural policy*, yaitu menentukan di sektor mana, dengan skema apa, dan dalam batasan apa investasi baik asing maupun domestik dapat masuk dan berkembang.

Secara konseptual, PP 28/2025 memperbaiki *how investment operates*, sedangkan revisi Perpres BUPM memperbaiki *where and under what conditions investment is allowed*.

### 6.2. Keterkaitan Temuan Institusional dan Reformasi Kebijakan

Untuk memperjelas keterhubungan antara temuan empiris dan respons kebijakan, Tabel berikut menyajikan matriks keterkaitan yang diperluas antara dua metrik institusional utama dan substansi reformasi PP 28/2025 serta revisi Perpres BUPM.

Matriks Tabel 6.1 menunjukkan bahwa secara desain, kedua instrumen kebijakan telah selaras dengan kebutuhan perbaikan stabilitas institusional. Namun, sebagian besar mekanisme koreksi masih beroperasi pada level normatif dan prosedural, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas implementasi.

**Tabel 6. 1** Analisis Keterkaitan Metrik/ Dimensi Institusional Indonesia dengan Reformasi Kebijakan terkait Investasi

<b>Dimensi Institusional</b>	<b>Sumber Ketidakpastian (B-READY 2024)</b>	<b>Dampak terhadap Investor</b>	<b>Instrumen Kebijakan Terkait</b>	<b>Mekanisme Perbaikan yang Diatur</b>
<i>Political &amp; Operational Stability</i>	Proses penyelesaian sengketa yang sangat lama dan perlindungan prosedural lemah	Penegakan kontrak tidak prediktabel, risiko hukum meningkat	PP 28/2025	Standardisasi proses administratif dan penegasan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
	Sistem perdagangan sudah digital namun belum efisien secara operasional	Biaya logistik tinggi dan gangguan rantai pasok	PP 28/2025	Integrasi OSS dengan proses teknis dan perdagangan
	Administrasi perpajakan lambat (restitusi dan sengketa pajak)	Tekanan arus kas dan ketidakpastian biaya usaha	PP 28/2025	Transparansi proses dan digitalisasi layanan melalui OSS
	Tata kelola utilitas kurang transparan	Biaya dan kualitas layanan sulit diproyeksikan	PP 28/2025 (implisit)	Digitalisasi dan standardisasi perizinan dasar
<i>Policy Stability for Doing Business</i>	Kesenjangan besar antara kualitas regulasi dan implementasi perizinan	Masuk usaha mahal, lama, dan diskresioner	PP 28/2025	Prinsip single reference dan kebijakan fiktif-positif
	Risiko tinggi pada lahan dan izin lingkungan	Ketidakpastian proyek investasi jangka panjang	PP 28/2025	Proses paralel dan digital untuk persetujuan lingkungan
	Proses perumusan kebijakan pajak minim konsultasi publik dan transparansi	Prediktabilitas fiskal rendah dan penurunan daya tarik imbal hasil	Revisi Perpres BUPM	Pendekatan <i>Regulatory Impact Assessment</i> (RIA) dan penyesuaian insentif
	Restriktivitas dan fragmentasi sektor usaha	Arah kebijakan investasi sulit diproyeksikan	Revisi Perpres BUPM	Pengurangan sektor bersyarat dan perluasan sektor prioritas
<b>Pesan Struktural Utama</b>	Kerangka regulasi dan sistem tersedia, tetapi implementasi tidak konsisten	Risiko kebijakan dan operasional tetap tinggi	PP 28/2025 & Revisi Perpres BUPM	Reformasi prosedural dan struktural secara simultan

**Sumber:** Analisa Penulis

### 6.3. Tantangan Implementasi dan Implikasi Kebijakan

Berbagai kajian implementasi terhadap PP 28/2025 menunjukkan bahwa tantangan utama reformasi perizinan tidak terletak pada desain regulasi, melainkan pada tata kelola pelaksanaannya. Tantangan tersebut dapat diringkas ke dalam tiga dimensi utama: kelembagaan, proses, dan sistem digital.

Pada dimensi kelembagaan, pembagian kewenangan antar-instansi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga proses pengambilan keputusan masih berlapis dan berpotensi menimbulkan *bottleneck*. Variasi kapasitas unit teknis juga menyebabkan standar pemeriksaan dan kepastian waktu layanan tidak konsisten di lapangan.

Dari sisi proses, sinkronisasi peraturan pelaksana dengan PP 28/2025 belum sepenuhnya tuntas, sementara redundansi dalam pemenuhan persyaratan dasar masih memperpanjang waktu dan biaya perizinan. Selain itu, meskipun *Service Level Agreement* (SLA) telah ditetapkan, keterkaitannya dengan indikator kinerja aparatur masih lemah, sehingga kepastian waktu belum berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas yang mengikat.

Pada dimensi sistem dan teknologi, integrasi perizinan lintas instansi belum berjalan secara *end-to-end*. Keterbatasan interoperabilitas dan pemanfaatan analitik kinerja membuat transparansi progres perizinan masih rendah, meskipun digitalisasi OSS telah diperluas (Parikesit & Dewi, 2025).

Dalam konteks ini, revisi Perpres BUPM berpotensi menambah beban implementasi apabila perluasan keterbukaan sektor dan skema insentif tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan dan sistem perizinan yang memadai. Tanpa penguatan kapasitas pelaksana dan penyederhanaan proses yang konsisten, reformasi sektoral yang lebih terbuka justru berisiko memperbesar tekanan administratif dan memperlebar kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan.

### 6.4. Rekomendasi Kebijakan Menuju 2026

Berdasarkan diskusi di atas, beberapa rekomendasi kebijakan utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penguatan stabilitas implementasi, melalui penautan SLA dengan indikator kinerja institusi dan mekanisme evaluasi berkala lintas kementerian/lembaga.
- b. Penyelarasan regulasi pelaksana, dengan memastikan seluruh aturan turunan konsisten dengan prinsip *single reference* dan pendekatan RIA.
- c. Penguatan koordinasi dan integrasi sistem, khususnya integrasi *end-to-end* OSS dengan sistem teknis sektoral dan daerah.
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui standarisasi kompetensi pemeriksa dan penguatan fungsi change management di tingkat pusat dan daerah.

Dengan demikian, peningkatan daya saing investasi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan reformasi normatif dan desain kebijakan. Tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa reformasi tersebut menghasilkan stabilitas dan prediktabilitas nyata dalam praktik, sehingga mampu memulihkan kepercayaan investor dan mendorong investasi berkualitas secara berkelanjutan.

## VII. Kesimpulan

*Paper* ini menganalisis daya saing investasi Indonesia dalam perspektif global dengan memanfaatkan indeks daya saing internasional dan validasi berbasis data mikro. Analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mencatat peningkatan realisasi investasi dan perbaikan skor agregat daya saing dalam beberapa tahun terakhir, kualitas daya saing investasi masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa kekuatan agregat pada faktor institusi justru menyembunyikan pelemahan pada dua metrik krusial, yaitu *Policy Stability for Doing Business* serta *Political and Operational Stability*, yang menjadi determinan utama keputusan investasi jangka panjang.

Melalui pendekatan dekomposisi dan validasi menggunakan *World Bank B-READY 2024*, *paper* ini menegaskan bahwa tantangan utama iklim investasi Indonesia tidak lagi terletak pada ketiadaan regulasi atau infrastruktur, melainkan pada kepastian waktu, konsistensi implementasi, transparansi kebijakan, dan kualitas tata kelola pelaksanaan. Kesenjangan antara desain regulasi dan praktik di lapangan menciptakan risiko kebijakan dan operasional yang nyata bagi investor, terutama dalam konteks masuk usaha, perizinan lahan dan lingkungan, administrasi perpajakan, serta penyelesaian sengketa.

Dalam kerangka kebijakan, PP 28/2025 dan revisi Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal diposisikan sebagai instrumen reformasi yang secara konseptual telah selaras dengan kebutuhan perbaikan institusional. PP 28/2025 berperan memperkuat dimensi operasional perizinan melalui standardisasi proses dan kepastian layanan, sementara revisi Perpres BUPM berfungsi sebagai kebijakan struktural untuk menata keterbukaan dan arah investasi sektoral. Namun, efektivitas kedua instrumen tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi, kapasitas kelembagaan, dan integrasi sistem lintas instansi. Tanpa penguatan aspek tersebut, reformasi normatif berisiko memperlebar kesenjangan antara kebijakan dan realisasi di lapangan.

Kontribusi utama *paper* ini terletak pada pendekatan analitis yang melampaui perbandingan peringkat indeks global, dengan menelusuri sub-faktor kritis dan mengaitkannya secara langsung dengan reformasi kebijakan investasi. Namun demikian, *paper* ini memiliki keterbatasan karena belum mengkaji secara mendalam dimensi daya saing investasi lainnya, serta belum mengeksplorasi variasi daya saing investasi pada tingkat sektoral dan daerah.

Ke depan, riset lanjutan perlu diarahkan untuk menindaklanjuti temuan *paper* ini ke dalam kerangka kebijakan yang lebih operasional, khususnya melalui perumusan *action plan* reformasi institusional yang menjabarkan langkah konkret, penanggung jawab kementerian/lembaga, serta mekanisme koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam meningkatkan stabilitas kebijakan dan kepastian operasional. Selain itu, analisis daya saing investasi perlu diperluas pada level sektoral dan regional untuk menangkap variasi tantangan dan peluang yang tidak tercermin dalam indikator agregat nasional. Riset selanjutnya juga penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor daya saing lainnya—seperti infrastruktur, efisiensi bisnis, dan kesiapan teknologi—agar pemetaan kekuatan dan kelemahan struktural Indonesia menjadi lebih komprehensif dan dapat mendukung perumusan kebijakan investasi yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

## Referensi

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et*

- Virtus*, 7(2), 84–99.
- Amrullah, & Sulaiman, A. (2026). Analysis of Foreign Investment Regulations in Indonesia from the Perspective of a Legal System that Supports Ease of Doing Business and Legal Certainty for Investors. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(4), 750–759.
- Asian Development Bank. (2023). *Asian Development Outlook April 2023*. Asian Development Bank. <http://dx.doi.org/10.22617/FLS230112-3>
- BPMI Setpres. (2025, January 2). *Pemerintah Targetkan Rp13.032 Triliun Investasi Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen*. [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_targetkan\\_rp13032\\_triliun\\_investasi\\_untuk\\_dorong\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_8\\_persen](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_targetkan_rp13032_triliun_investasi_untuk_dorong_pertumbuhan_ekonomi_8_persen)
- Budiman, A., Deliberto, F., Wijaya, L., & Huda, A. (2025). DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA (2019-2024). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 15(1), 38–53.
- Enderwick, P. (2011). A ‘China-Plus-One’ strategy: The best of both worlds? *Human Systems Management*, 30(1–2). <https://doi.org/10.3233/HSM-2011-0735>
- Google, TEMASEK, & Bain & Company. (2023). *Reaching new heights: Navigating the path to profitable growth* (e-Conomy SEA 2023).
- Harahap, D. K., Pangaribuan, L. R., Winanda, P., & Armayani, R. R. (2025). Arah Investasi dan Prospek Perekonomian Indonesia di Tengah Perubahan Global. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 297–302. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17936819>
- IMD World Competitiveness Center. (2025a). *IMD World competitiveness booklet 2025* [Pdf]. IMD – International Institute for Management Development.
- IMD World Competitiveness Center. (2025b). *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2025* [Pdf]. IMD – International Institute for Management Development.
- IMD World Competitiveness Center. (2025c). *IMD World Talent Ranking 2025* [Pdf]. IMD – International Institute for Management Development.
- International Energy Agency. (2023). *World Energy Outlook 2023*. [www.iea.org/weo](http://www.iea.org/weo)
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM. (2024). *PRESS RELEASE REALISASI INVESTASI TRIWULAN II 2024*.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM. (2025). *Siaran Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan III dan Januari—September Tahun 2025*.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM. (2026, January). *PRESS RELEASE: CAPAIAN KINERJA INVESTASI Triwulan IV Tahun 2025 Januari – Desember 2025*.
- Kher, P., Kusek, P., & Eltgen, M. P. (2022). *Indonesia—2022 Investment Policy and Regulatory Review*. World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099010009062240252>
- Lund, S., Manyika, J., Woetzel, J., Bughin, J., Krishnan, M., Seong, J., & Muir, M. (2019). *Globalization in transition: The future of trade and value chains*.
- Muliawati, F. D. (2025, September 4). *Target Investasi RI 2026 Tembus Rp 2.175,26 T, Naik 14,2%*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250904164345-4-664378/target-investasi-ri-2026-tembus-rp-217526-t-naik-142>
- Oktaviana, R. N., & Wulandari, S. (2022). Analisis Kemudahan Berbisnis dan Tata Kelola

- Perusahaan yang Baik di Indonesia dalam Menciptakan Daya Saing Global. *JUDICIOUS*, 3(1), 35–48. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i1.698>
- Pardede, M. (2023). Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 231–244. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.231-244>
- Parikesit, I. K., & Dewi, P. E. T. (2025). Analysis Of Government Regulation Number 28 Of 2025 Concerning The Implementation Of Risk-Based Business Licensing: Impact On The Investment Climate And Foreign Investment In Indonesia. *International Journal of Science and Environment*, 225–232.
- Putri, R. R., Chandrawulan, A.-A., & Amalia, P. (2018). PERINGKAT ARUS INVESTASI INDONESIA DALAM KERANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA, MALAYSIA, THAILAND, DAN VIETNAM) DITINJAU DARI PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 275. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1664>
- Schwab, K., & Zahidi, S. (2020). *How countries are performing on the road to recovery*. World Economic Forum.
- Silalahi, P., & Primacintya, V. A. (2025). The Role of Investment in Promoting Inclusive Growth: A Panel Data Study of Indonesian Provinces. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 116–132. <https://doi.org/10.29244/jekp.14.2.2025.116-132>
- Triana, A. R., Putri, A. A., Mar'atussholikhah, K., Sukma, V. S., Firdaus, F., & Hidayat, M. F. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 246–262.
- (UNCTAD), U. N. T. and D. (2025). *World Investment Report 2025: International Investment in the Digital Economy* (1st ed). United Nations Research Institute for Social Development.
- Valle-Lisboa, J. C., & Mizraji, E. (2006). *The uncovering of hidden structures by Latent Semantic Analysis*. Universidad de la Republica.
- World Bank Group. (2020). *Global Investment Competitiveness Report 2019/2020: Rebuilding Investor Confidence in Times of Uncertainty*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1536-2>
- World Bank Group. (2024). *Business Ready (B-READY) survey results: Indonesia*. World Bank Group.
- World Intellectual Property Organization. (2020). *Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?* [Pdf]. World Intellectual Property Organization,.
- World Intellectual Property Organization. (2021). *Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis* [Pdf]. World Intellectual Property Organization,.
- World Intellectual Property Organization. (2022). *Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth?* [Pdf]. World Intellectual Property Organization,.
- World Intellectual Property Organization. (2023). *Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of uncertainty* [Pdf]. World Intellectual Property Organization,.
- World Intellectual Property Organization. (2024). *Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship* [Pdf]. World Intellectual Property Organization,.

- World Intellectual Property Organization. (2025). *Global Innovation Index 2025: Innovation at a Crossroads* (p. 26.9 MB, 295 pages :) [Pdf]. World Intellectual Property Organization,. <https://doi.org/10.34667/TIND.58864>
- Yuwono, T., Wiryawan, B. A., & Yuzuru, S. (2025). The effect of regulatory governance system on investment growth in decentralized Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7, 1630368. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1630368>